

BAB II

DINAMIKA KAMPANYE PILPRES 2022 DI KOREA SELATAN

2.1 Profil Calon Presiden Korea Selatan 2022

Menyambut pesta demokrasi di Korea Selatan yang diadakan selama 5 tahun sekali, pemilihan presiden 2022 menampilkan kandidat-kandidat kuat dari partai politik yang ada. Ada Yoon Seok Yeol dari *People Power Party* (PPP), Lee Jae-myung dari *Democratic Party* (DP), Ahn Cheol-soo *People Power Party* (PPP), dan Shim Sang-jung dari *Justice Party* (JP).

Yoon Suk-Yeol merupakan seorang mantan jaksa agung yang pertama kali terjun ke dunia politik. Ia telah banyak memberikan kontribusi nyata pada bidangnya yaitu hukum dan kehakiman sejak 2019 hingga 2021 karena berhasil menangani beberapa kasus korupsi yang berhubungan dengan politikus dan pengusaha. Salah satu kasus yang ditangani tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Park Geun-Hye yang berujung pada pemakzulannya.³⁴

Yoon Suk-Yeol berasal kalangan akademisi melihat dari latar belakang ayahnya sebagai seorang Profesor dan pendiri Departemen Statistik di Universitas Yonsei. Ia lahir di Yeohui-dong, Distrik Soedaemun, Seol pada 1960. Sejak menempuh perkuliahan, Yoon sering terlibat dalam aksi-aksi yang menentang pemerintahan saat itu salah satunya terlibat dalam aksi gerakan Gwangju. Sosok

³⁴ Park Geum-hye merupakan Presiden Wanita pertama Korea Selatan yang menjabat selama 16 tahun dari 1963-1979. Ia merupakan putri Diktator Park Chung-Hee. Selama menjabat ia pernah mengeluarkan kebijakan sosial dengan pemberantasan empat kejahatan sosial utama yaitu Kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah dan makanan yang tidak aman. Baca lebih lanjut Barbara Demick and Jung-Yoon Choi, "South Korea Elects First Female President," *Los Angeles Times*, last modified 2012, <https://www.latimes.com/world/la-xpm-2012-dec-19-la-fg-south-korea-park-20121220-story.html>.

Yoon juga ikut memimpin simulasi persidangan saat menuntut hukuman mati terhadap presiden Chun Doo-Hwan³⁵. Yoon sempat mengalami kesulitan ketika mengejar gelar sarjana hukum karena memiliki riwayat ‘demonstran’ di bangku perkuliahan. dan menghabiskan waktu sekitar 9 tahun untuk meraih gelar sarjananya di Universitas Nasional Seoul pada tahun 1979 kemudian melanjutkan jenjang pendidikan magister hukum di universitas yang sama dan selesai pada tahun 1988.³⁶

Setelah mendapatkan gelar tersebut, Yoon terjun ke dunia hukum dan kehakiman sesuai dengan tujuannya untuk mereformasi politik struktural di Korea Selatan. Karir pengacaranya dimulai sejak tahun 1991 setelah lulus ujian pengacara ke-33 dan menyelesaikan studinya di Penelitian dan Pelatihan Peradilan di angkatan 23, hal inilah membuatnya direkrut Kantor Kejaksaan Distrik Daegu dan bekerja di Divisi Investigasi Khusus yang menangani kasus korupsi sebagai asisten jaksa pada 1994. Sejumlah posisi penting di divisi ini pernah dijabat, yaitu pernah menjabat sebagai Direktur Divisi Khusus 1 Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul dan Kepala Divisi 1 dan 2 Kantor Kejaksaan Agung.³⁷

Selain berhasil menangani kasus korupsi yang berhubungan langsung dengan pemakzulan Park Geun-Hye dan para politikus dan pengusaha lainnya. Ia

³⁵ Won Hee-bok, “[원희복의 인물탐구]윤석열 대전고검 검사... 소영웅주의자인가, 검찰의 자존심인가,” *Weekly Khan*, last modified 2016, http://m.weekly.khan.co.kr/view.html?med_id=weekly&artid=201602161453131&code=115.

³⁶ All News, “Chronology of Major Events in President-Elect Yoon Suk-Yeol’s Biography,” *Yonhap News Agency*, last modified 2022, accessed July 15, 2023, <https://en.yna.co.kr/view/AEN20220308009800315>.

³⁷ Hanwa, “윤석열 검찰총장 후보자는? ‘강직한 성품 원리원칙주의자,’” *Hanwa*, last modified 2019, accessed July 15, 2023, <http://www.sisaweekly.com/news/articleView.html?idxno=20840>.

juga berhasil membuktikan penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Dinas Intelijen Badan Kepolisian Nasional di era pemerintahan Kim Dae-Jung meskipun mendapat tekanan dari atasannya. Dan berhasil menangkap bawahan-bawahan Badan Kepolisian Nasional yang terlibat skandal korupsi meskipun ditentang oleh pimpinan kejaksaan. Karena tindakan yang berani tersebut tahun 2013 mengakibatkan ia mendapatkan sanksi dengan diturunkan ke Kantor Kejaksaan Distrik Daegu dan diberikan skorsing satu bulan dari atasannya.³⁸

Pada 2016, Yoon Suk-yeol bergabung dalam tim Investigator Independen untuk menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Park Geun-hye.³⁹ Keahlian investigasinya pun terbilang bagus di bidangnya dan berhasil mengungkap skandal politik nasional terbesar di tahun tersebut. Skandal ini menyeret nama-nama tokoh termasuk Choi Soon-Sil dan eksekutif Samsung Lee Jae-Young. Skandal ini pun berujung pada pemakzulan Presiden Park yang menjadi catatan sejarah. Karena Presiden Park merupakan pemimpin negara pertama yang terpilih secara demokratis namun diturunkan dari jabatannya oleh Majelis Hakim Konstitusi.⁴⁰ Citra inilah yang membuat Yoon Suk-Yeol dikenal sebagai jaksa yang tegas dan independen.

³⁸ Kang Hyun-kyung, "Uncompromising Prosecutor's Crusade to Bring Back Justice," *The Korea Times*, accessed July 15, 2023, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/03/803_325232.html.

³⁹ Park Geum-hye merupakan Presiden Wanita pertama Korea Selatan yang menjabat selama 16 tahun dari 1963-1979. Ia merupakan putri Diktator Park Chung-Hee. Selama menjabat ia pernah mengeluarkan kebijakan sosial dengan pemberantasan empat kejahatan sosial utama yaitu Kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah dan makanan yang tidak aman. Baca lebih lanjut Demick and Choi, "South Korea Elects First Female President."

⁴⁰ BBC News, "Presiden Korea Selatan Park Geum-Hye Resmi Dipecat Karena Skandal," *BBC News Indonesia*, accessed July 15, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39227516>.

Selama delapan tahun menjalankan amanah di Kejaksaan Daegu, ia mengundurkan diri namun setelah itu, Yoon dipilih kembali oleh Presiden Moon Jae-In menjadi Direktur Divisi Pertama Departemen Investigasi Pusat Kejaksaan Agung dan Kepala Departemen Investigasi Khusus pertama Kantor Kejaksaan Distri Pusat Seoul. Penunjukkan ini merupakan sebuah bagian dari reformasi hukum yang dijalankan oleh Moon. Ia dipilih menjadi Jaksa Agung di waktu 2019-2021 dibawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in. Pada Agustus 2019, selama masa jabatannya ia pernah diminta dan menerima untuk melakukan penyelidikan terhadap keluarga Cho Kuk yang saat itu dipilih oleh Presiden Moon sebagai Menteri Kehakiman. Akan tetapi dengan sikapnya tersebut membuat Partai Demokrat dan pendukungnya mengkritik kinerja Yoon Suk-Yeol yang pada akhirnya Cho Kuk juga digantikan oleh Choo Mi-Ae. Dari hal tersebut membuat beberapa orang memiliki sentimen buruk terhadap kinerja Yoon. Bahkan Cho Kuk pun melakukan tindakan disiplin ke beberapa jaksa yang dekat dengan Yoon. Tuduhan yang dilayangkan bahwa Yoon gagal menyerahkan rencana reorganisasi di dalam departemennya. Hal ini justru membuat anggota parlemen Partai Demokrat kembali menyerang Yoon dan memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Di ujung jabatannya, Yoon mengalami skorsing beberapa kali dari Kementerian Kehakiman, menerima empat dari enam dakwaan utama sebagai tindakan disipliner. Keputusan itu pun juga langsung disetujui oleh Presiden Moon. Kemudian pada tanggal 24 Desember, dengan mengikuti perintah Pengadilan Administratif Seoul, penangguhan dibatalkan karena pengadilan menerima klaim

Yoon bahwa proses penangguhannya tidak adil. Dilanjutkan pada 4 Maret 2021 akhirnya Yoon mengajukan pengunduran diri sebagai Jaksa Agung yang diterima oleh Presiden Moon. Dua bulan setelahnya, ia secara resmi mengumumkan pencalonan presidennya pada tanggal 21 Juni 2021.⁴¹

Setelah mengundurkan diri dari posisi Jaksa Agung, Yoon Suk-Yeol mengatakan ingin mencalonkan diri sebagai presiden Korea Selatan akibat sikap kontra terhadap pemerintahan Moon Jae-in, yang kemudian direkrut oleh *People Power Party* (PPP). Yoon Seok-Yeol terbilang baru berkecimpung di dunia politik bersama *People Power Party* (PPP) tahun 2022. Hal ini merupakan pertama kalinya Yoon Seok-Yeol terjun ke dunia politik walaupun hanya sebagai Jaksa Agung namun popularitas Yoon di kalangan politikus sangat diperhitungkan. Di era kepresidenan Roh Moo-Hyun ia sudah membangun *personal branding* sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Suwon dengan menangkap politikus Ahn Hee-Jung dan Kang Geum-Won. Selain itu, Yoon terlibat dalam kasus pemakzulan Presiden Park-Geum-Hye yang menyeret sejumlah tokoh besar chaebol seperti Choi Soon-Sil (CEO LG) dan Lee Jae-Young (CEO Samsung). Bahkan setelah terpilih sebagai Jaksa Agung di masa kepresidenan Moon Jae-In, ia memiliki sikap berani dan tegas serta tidak pandang bulu untuk menyelidiki orang-orang kepercayaan Moon. Salah satunya, ialah Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang membuat namanya semakin diperhitungkan para politikus Korea Selatan.

⁴¹ Ko Jun-Tae, "Ex-Prosecutor General Yoon Seok-Yeol Announces Presidential Bid," *The Korea Herald*, last modified 2021, accessed July 15, 2023, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210629000835>.

Sedangkan kandidat lainnya berasal dari *Democratic Party* (DP) yang mengusung Lee Jae-myung, Shim Sang-Jung dari *Justice Party*, dan Ahn Cheol-soo yang juga dari *People Power Party* (PPP). Lee Jae-myung berlatar belakang dari keluarga miskin dan bekerja di pabrik yang memiliki cita-cita menjadi seorang pengacara. Keluarga Lee Jae-myung merupakan keluarga menengah ke bawah yang dapat dikatakan kesusahan untuk memberikan pendidikan yang layak. Namun akhirnya Lee mampu mendapatkan beasiswa di Universitas Chung-Ang Seoul setelah menyelesaikan studi siswanya melalui ujian kualifikasi.

Lee memutuskan terjun ke dunia politik setelah Dewan Kota Seongnam tidak menerima rancangan undang-undang untuk membangun institusi medis publik di Kota yang diusulkan olehnya yang saat itu dipegang oleh kubu konservatif. Lee terjun ke dalam percaturan politik sejak 2004 sebagai calon walikota Seongnam namun gagal namun ia mencoba kembali pada tahun 2010 dan terpilih sebagai walikota Seongnam. Salah satu langkah besarnya ialah mendirikan rumah sakit baru dengan fasilitas kamar yang banyak sebagai acuan rumah sakit rujukan nasional. Hal itu membuat ia kembali terpilih pada 2014 sebagai walikota. Pada tahun 2017 menjelang pemkzulan Park Geun-hye, Lee masuk ke dalam calon presiden yang akan diusung oleh *Deomcratic Party* (DK). Ambisi besarnya ingin mengurangi jurang pemisah antara kelas menengah atas dan bawah serta merombak besar-besaran chaebol seperti Samsung dan Hyundai yang sudah menguasai ekonomi Korea Selatan sejak lama. Akan tetapi ia gagal jadi presiden dan satu tahun berikutnya, Lee terpilih sebagai gubernur di Provisnis Gyeonggi. Selama menjadi gubernur, ia dikenal sebagai gubernur yang senantiasa memberikan bantuan tunai

langsung untuk kaum muda. Salah satu prestasinya, ialah dianggap sigap dalam menangani covid-19.⁴²

Selanjutnya, Shim Sang-jung sebagai kandidat dari partai haluan kiri yang dikenal konsisten mengawal isu tentang perburuhan. Shim merupakan satu-satunya kandidat presiden perempuan yang diusung *Justice Party* (JP). Shim merupakan anggota Majelis Nasional ke-19 dari wilayah Gyeonggi pada tahun 2012 hingga 2020 dan sebagai anggota parlemen empat periode pertama dari partai progresif di Korea. Terakhir, adalah Ahn Cheol-soo dari *People Power Party* (PPP) yang pada akhirnya mundur sebagai kandidat untuk berfokus mendukung Yoon Seok-Yeol dari partai yang sama dengannya.

a. Partai Politik Yoon Seok-Yeol

Di Korea Selatan menganut sistem multipartai namun ada dua poros kekuatan besar, yaitu ideologi progresif dan konservatif. Partai yang menganut ideologi Konservatif cenderung memegang prinsip dan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sosial dan budaya seperti pernikahan, keluarga, agama, dan moralitas. Partai konservatif cenderung menekankan pada prinsip nasionalisme dan menekankan kebanggaan budaya, sejarah dan prestasi Korea Selatan. Selain itu, menekankan pada kebijakan pro-unifikasi Korea melalui cara-cara dialog dan diplomasi yang hati-hati namun tegas dan berani.

People Power Party (PPP) merupakan partai koalisi dari tiga partai politik konservatif yaitu Partai Liberty Korea, Partai Konservatif Baru dan Partai Persatuan

⁴² Bening Tiara Shany, "STRATEGI KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN KOREA SELATAN TAHUN 2022 TERKAIT PEMULIHAN EKONOMI PASKA COVID-19" (University of Muhammadiyah Malang, 2023).

Masa Depan 4.0 yang berkoalisi pada tanggal 2 September 2020. Dengan bergabungnya tiga partai di Korea Selatan membuat penyatuan pendukung pun jadi solid dan menjadi kekuatan oposisi baru di pilpres 2022 di Korea Selatan. Partai ini merupakan partai yang berisi kaum-kaum konservatif yang pro-bisnis terutama kelas menengah atas di Korea Selatan. Banyak di antaranya mendukung kerjasama dengan Amerika untuk memperlancar bisnisnya, salah satunya LG, Samsung, dan Hyundai. Golongan ini disebut chaebol yang dikenal sebagai konglomerat di Korea Selatan. Anggota keluarga maupun kerabat chaebol banyak yang bertugas sebagai anggota dewan atau menteri kabinet. Model ekonomi yang sangat disukai ialah berbasis ekspor, mencari selisih yang menguntungkan, dan lain-lain.

Partai ini memiliki tujuan yaitu menghormati semangat konstitusi sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan Republik Korea. Mewujudkan dan memperluas nilai-nilai kebebasan, demokrasi, republik, dan keadilan secara jujur, yang merupakan inti dari tatanan ketatanegaraan. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan prestise bangsa dengan mewujudkan nilai-nilai tersebut, memprioritaskan keamanan nasional yang melindungi kehidupan dan keselamatan rakyat, mendorong pertumbuhan yang dipimpin swasta berdasarkan ekonomi pasar dan ilmu pengetahuan serta teknologi.⁴³

Selain itu, partai tersebut mendukung kembali pengadaaan aliansi ROK-AS (Republic of Korea-Amerika Serikat) yang merupakan syarat penting bagi perkembangan Korea Selatan. Artinya, partai ini termasuk ke dalam golongan anti-

⁴³ People Power Party, “대한민국을 확 바꾸겠습니다 [윤석열 후보 선대위 출범식 연설문],” *People Power Party*, last modified 2022, accessed June 26, 2022, http://www.peoplepowerparty.kr/renewal/news/notice_view.do?bbsId=HNS_000000002761623.

Korea Utara dan anti-komunis dan mendukung pendirian konfrontatif garis keras melawan musuh utara. Sebagai konsekuensinya, partai ini tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, mendukung kehadiran militer AS yang terus berlanjut hingga perjanjian perdagangan bebas Korea Selatan-AS usai. Basis utama kekuatan Partai ini ada pada generasi tua (yang hidup saat mengalami krisis kemiskinan sebelum industrialisasi yang pesat). Hal tersebut pun ingin dituangkan kepada generasi-generasi muda yang harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya, membuat partai ini berada pada jalur ekspansi wilayah otonomi pemuda untuk partisipasi dengan menegakkan supremasi hukum yang sesuai.

Ada beberapa alasan *People Power Party* (PPP) merekrut Yoon Suk-Yeol sebagai calon presiden 2022. Pertama ialah, internal partai mengalami krisis figur ketika masa pemerintahan Moon. Tidak ada satupun anggota dari Partai Konservatif bersikap sebagai oposisi yang tegas dan berani. Hal ini juga diikuti dengan keinginan balas dendam pada pemilihan sebelumnya tahun 2017 yang saat itu Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilihan. Alasan tersebut membuat *People Power Party* (PPP) mencari figur yang mampu membalaskan kekalahan masa lalu. Selain Yoon Suk-Yeol ada pula nama seperti Hong Joon-Pyo, Yoo Seung-Min dan Won Hye-ryong akan tetapi semuanya tidak memiliki karakteristik seperti yang dimiliki Yoon.⁴⁴ Artinya *fit and proper test* yang dilakukan *People Power Party* (PPP) hanya Yoon yang lulus uji kelayakan tersebut untuk diusung partai.

⁴⁴ Lee Young, "Mengapa Yoon Suk-Yeol Terpilih Sebagai Kandidat Dari Partai Kekuatan Rakyat," *Kuki News*, last modified 2021, <https://www.kukinews.com/newsView/kuk202111140033>.

Situasi pemilu di Korea Selatan selalu digambarkan dengan adanya politisi dan partai politik yang selalu mengaku mampu menyelesaikan masalah penting dalam masyarakat seperti ekonomi, kesejahteraan rakyat, diplomasi dan keamanan, dan sebagainya. Akan tetapi janji itu hanya selalu menjadi harapan belaka dan tak jarang partai politik dan politisi selalu menutup telinga ketika menjadi pemenang.⁴⁵

Menuju negara demokrasi yang optimal, perlu mencari perubahan di dalam institusional yang lebih stabil dan hal tersebut terletak pada partai politik. Perlu disadari bahwa partai politik merupakan akar masalah daripada politisi. Karena politisi merupakan delegasi dari partai politik. Seharusnya suara yang menyerukan reformasi partai harus tumbuh lebih keras daripada mengganti politisi. Hanya dengan begitu, politik di Korea Selatan dapat mencapai perubahan yang berarti. Akan tetapi, jika partai politik gagal menjalankan fungsinya maka warga negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi hanya setengah kedaulatan.⁴⁶

b. Isu Gender dalam Kampanye

Pada Januari 2022, salah satu kandidat presiden dari *People Power Party* (PPP) berjanji dalam sebuah postingan *facebook* akan menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, dalam bahasa Korea disebut Kementerian Perempuan dan Keluarga (*Yeoseonggajokbu*). Kementerian ini memberikan layanan berbasis keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk anak-anak. Sebagai perwakilan dari partai konservatif terbesar di negara tersebut, Yoon

⁴⁵ Jo Jin-man, “국민의힘에 보수의 가치와 품격이 있는가,” *Sosial Korea*, last modified 2022, accessed July 16, 2023, <https://socialkorea.org/politics/국민의힘에-보수의-가치와-품격이-있는가/?ckattempt=1>.

⁴⁶ Maurice Duverger, *Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan*, ed. Affan Gaffar and Laila Hasyim (Jakarta: Bina Aksara, n.d.).

memanfaatkan perasaan yang lebih luas di kalangan laki-laki dan memberikan validasi kepada kelompok anti-feminis bahwa kementerian tersebut gagal menjalankan fungsinya. Dengan adanya janji tersebut, dampak pendukung dari kandidat Yoon meningkat dari hasil survei sekitar 6% unggul tipis dari kandidat Lee.⁴⁷

Sementara itu, kandidat dari *Democratic Party* justru berjanji untuk melakukan rekonstruksi kementerian tersebut menjadi Kementerian Kesetaraan dan Keluarga (*Pyeongdeunggajokbu*). Lebih lanjut, ia menekankan pada aspek mengurangi kesenjangan upah bagi perempuan di dunia kerja dan memiliki formula untuk memerangi diskriminasi dalam perekrutan dan mendorong perempuan dalam berpartisipasi di ranah politik yang lebih luas.

Konflik gender yang semakin dipolitisasi membuat kedua partai ini kehilangan simpati dari perempuan-perempuan muda yang merasa frustrasi dengan realita yang ada. Terlebih lagi, serentetan skandal yang dilakukan oleh *Democratic Party* (DP) menyebabkan banyak warga Korea yang progresif meninggalkan partai tersebut. Bahkan beberapa kelompok perempuan melakukan protes di depan markas dua partai tersebut dengan mengkritik eksploitasi kebencian terhadap perempuan. Di sisi lain, kubu *People Power Party* (PPP) dan kampanye Yoon juga terang-terangan menyalahkan feminisme yang menyebabkan rendahnya angka kelahiran dan menentang gerakan #MeToo serta beranggapan feminisme radikal

⁴⁷ Darcie Draudt, "The South Korea Election's Gender Conflict and the Future of Women Votes," *Council on Foreign Relations*, last modified 2022, <https://www.cfr.org/blog/south-korean-elections-gender-conflict-and-future-women-voters>.

sama dengan terorisme.⁴⁸ Bahkan menurut kandidat Yoon, kesenjangan struktural, ekonomi, dan fisik tampaknya masih pada tingkat yang sangat terbatas sehingga kementerian tersebut tidak diperlukan. Baginya, kementerian ini bertujuan memperlakukan laki-laki sebagai potensi pelanggar seks dan hanya akan memperburuk masalah gender di Korea Selatan.

Mengingat, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan kesenjangan gender terluas di dunia. Hal tersebut menunjukkan dalam beberapa dekade terakhir belum ada peningkatan dan masih tetap tertinggal, seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, dan partisipasi politik perempuan. Terlebih lagi, konflik gender masih menjadi hal yang serius bagi perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan di ranah publik. Politisi tidak seharusnya mengambil peran memperparah kondisi tersebut di Korea Selatan karena akan mengakibatkan bola salju yang akan semakin besar dampak permasalahannya.

2.2 Perempuan dan Politik di Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara maju yang memiliki teknologi yang begitu pesat dan diimbangi dengan kekuatan ekonomi yang stabil. Namun, hal itu tidak diiringi dengan pembangunan kapasitas sumber daya perempuannya. Mayoritas masyarakat Korea Selatan masih memandang perempuan sebagai makhluk hidup yang rendah dan tidak berdaya. Hal tersebut mengakibatkan perempuan masih banyak mengalami kekerasan baik itu di ranah domestik maupun publik. Sehingga

⁴⁸ Anthony Kuhn, "As South Koreans Go to the Polls, a Backlash against Feminism Has Become Political," 2022, <https://www.npr.org/2022/03/08/1085111819/as-south-koreans-go-to-the-polls-a-backlash-against-feminism-has-become-political>.

membuat Korea Selatan menyandang predikat sebagai salah satu negara dengan kesenjangan gender yang tinggi. Berdasarkan data *World Economic Forum's* pada tahun 2022 Korea Selatan masih berada di peringkat 102 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender.⁴⁹

Secara historis, kesenjangan gender dalam ranah politik di Korea Selatan sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu sebelum adanya demokratisasi. Sebelum masa demokratisasi, perempuan hanya mendapat kursi di pemerintahan sekitar 0,5-2,5%. Hal ini terus berlangsung hingga masa perjuangan demokratisasi Korea Selatan tahun 1980-an. Aksi-aksi yang terus dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan akhirnya mampu menggaet perempuan lebih banyak untuk menyampaikan aspirasinya terhadap tuntutan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di segala lini, terutama dalam politik melalui berbagai cara seperti penyampaian aspirasi di ruang-ruang publik hingga membentuk suatu wadah yang menjadi gerakan wanita di Korea Selatan.⁵⁰

Organisasi perempuan yang lahir saat itu adalah *Korean Women's Association United* (KWAU) pada tanggal 18 Februari 1987 dengan berafiliasi 7 cabang dan memiliki 30 *underbouw women's organization* yang tersebar di

⁴⁹ World Economic Forum, "The Industry Gender Gap: Women and Work in the Fourth Industrial Revolution," *World Economic Forum* 69, no. 1 (2016): 819–846, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022022113520075><http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/a0014651><http://search.proquest.com/docview/1776113790?accountid=26646>http://link.periodicos.capes.gov.br/sfx/lc141?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=i.

⁵⁰ Oktavia Widya Kumalasari and Hamdan Nafiatur Rosyida, "Upaya Korea Women's Association United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Ranah Politik Korea Selatan" 6 (2022): 288–300.

berbagai kota di Korea Selatan.⁵¹ Lahirnya organisasi ini menjadikan tekad yang semakin solid untuk memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan.

Rasio populasi perempuan dan laki-laki di Korea Selatan adalah 1:1. Hal ini merupakan jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya jumlah perempuan yang terlibat secara aktif di politik masih sangat terbatas di Korea Selatan. Anggota parlemen perempuan di Korea Selatan masih dibawah rata-rata dunia 21,7% dimana 35.728 anggota parlemen adalah laki-laki sementara perempuan hanya 9.891 orang.⁵² Barometer lain untuk mengukur kesetaraan gender dalam politik berdasarkan laporan *The Global Gender Gap* Korea Selatan berada di peringkat 99 dengan *gap* 0,689 antara perempuan dan laki-laki dalam parlemen.⁵³ Korea Selatan juga menandatangani *Beijing Declaration and Platform for Action* (BPFA) 1995, sebuah rencana strategi dalam memperbaiki 12 keadaan yang menyangkut perempuan dan anak.

Masalah tersebut antara lain; perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan, mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, hak-hak asasi perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan hidup, dan terakhir adalah anak-anak perempuan.

⁵¹ KWAU, “Major Action and Achievements,” last modified 2021, <http://women21.or.kr/major?ckattempt=1>.

⁵² Inter-Parliamentary Union, “Monthly Ranking of Women in National Parliaments,” *IPU*, last modified 2023, <https://data.ipu.org/>.

⁵³ World Economic Forum, *Global Gender Gap Report 2022: Insight Report July 2022*, *World Economic Forum*, 2022, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf.

Penelitian yang dilakukan oleh sekelompok politisi perempuan, kondisi perempuan saat ini di Korea Selatan hanya sekitar 10,5% dari 934 kandidat yang dicalonkan dan mencalonkan diri untuk kursi daerah pemilihan adalah perempuan. Di antara 51 perempuan yang mendapatkan kursi di parlemen, 25 di antaranya dipilih melalui perwakilan proporsional. Kelompok ini juga melakukan survei pada 909 warga Korea Selatan yang berusia 19 tahun ke atas mengenai kehadiran perempuan dalam politik. Ada sekitar 69,5% berpendapat bahwa perempuan kurang berpartisipasi dalam politik, meskipun Korea Selatan adalah negara maju. 26,6% mengatakan bahwa tidak merasa nyaman dengan politisi perempuan. Sementara 24,5% mengatakan jika politisi laki-laki seharusnya lebih mampu dibandingkan politisi perempuan. Namun sebagian besar peserta pemilu, 37,8% mengatakan akan memilih kandidat perempuan jika memiliki kredibilitas dan pengalaman serupa dengan kandidat laki-laki. Sisanya 29,1% mengatakan akan memilih laki-laki walaupun kandidat perempuan memiliki kapasitas yang bagus daripada laki-laki.⁵⁴

2.3 Isu Gender Sebagai Strategi Kampanye di Masa Sebelum Yoon Suk-Yeol

Gender merupakan hal fundamental dan diperjuangkan di setiap negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian yang berkelanjutan. Akan tetapi, realitanya tidak demikian, dimana masih banyak ketidaksetaraan gender di dunia yang masih mementingkan satu gender saja. Dalam hal ini, perempuan selalu dijadikan objek belaka di tiap lini kehidupan dan akses untuk ranah publik masih rendah dibandingkan dengan laki-laki seperti di ranah pendidikan, pekerjaan,

⁵⁴ Claire Lee, "Women's Presence in Politics Still Limited in South Korea," *Iknowpolitics* (n.d.), <https://www.iknowpolitics.org/en/news/world-news/women's-presence-politics-still-limited-south-korea>.

ekonomi, kesehatan. Bahkan di ranah politik di seluruh dunia hanya mencapai 25,58% dan jauh dari standar kesetaraan gender pada umumnya yaitu 30-40%.⁵⁵

Gender selalu menjadi isu yang menarik untuk diangkat dalam isi kampanye di tiap pemilihan presiden terkhusus untuk kepentingan jangka pendek. Terlebih lagi di negara Korea Selatan yang merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang stabil. Terlepas dari modernisasi yang begitu pesat justru di Korea Selatan isu gender menjadi masalah baru dengan masuknya ideologi-ideologi barat salah satunya feminisme.

Tingkat kekerasan gender di Korea Selatan berdasarkan *UN Women* pada tahun 2021 berada di angka 8% wanita berusia 15-49 tahun melaporkan telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan atau mantan pasangan intim. Hal tersebut menjadi masalah yang seksis untuk menarik minat pemilih di tiap masa kepresidenan di Korea Selatan. Untuk itu, tiap masa kampanye presiden yang terpilih sejak lama. Tiap presiden Korea Selatan sejak Park Geun-Hye hingga presiden terbaru Yoon Seok-Yeol melihat serius permasalahan ini untuk diatasi melalui janji-janji sewaktu kampanyenya.

a. Pada Masa Park Geun-Hye (2012-2017)

Pada masa terpilihnya Park Geun-Hye sebagai presiden Korea Selatan mencetak sejarah baru yaitu presiden perempuan pertama. Sebagai presiden perempuan Korea Selatan pertama, Park Geun-Hye mengambil hati para perempuan-perempuan untuk melakukan mempromosikan kebijakan kesetaraan gender. Janji politik yang diberikan Park ada tiga poin. Pertama, melakukan

⁵⁵ IDEA, "Gender Quotas Database," <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas>.

peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan di aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam posisi kepemimpinan dan penunjukkan mereka



Gambar 2.2 Park Geun-Hye ketika melakukan kampanye tahun 2013 di Kota Seoul. Sumber: <https://babel.antarane.ws.com/berita/758/park-geun-hye-dan-politik-gender-asia>

pada jabatan-jabatan penting dalam struktural pemerintahan. Kedua, berkomitmen melakukan peningkatan peluang pendidikan dan pelatihan bagi perempuan yang berkualitas guna berfokus pada masalah ketegangan gender dalam sektor-sektor tertentu. Ketiga, berencana untuk mendukung pengembangan usaha kecil yang dilakukan oleh perempuan dengan program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.⁵⁶

Setelah terpilih, produk kebijakan Park Geun-Hye tentang kesetaraan gender, diwujudkan dalam penggabungan Kementerian Kesetaraan Gender dan Kementerian Urusan Keluarga menjadi Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Tujuannya ialah mengimplementasikan beberapa kebijakan terkait kesetaraan gender dan masalah keluarga. Selain itu, pemerintahan Park membuat program baru yaitu *Women and Work Initiative* yang bertujuan meningkatkan

⁵⁶ Yunan Bagaskara Pratama, "Kemenangan Park Geun-Hye Dalam Pemilihan Presiden 2012 Di Korea Selatan" (Universitas Jember, 2017).

partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Inisiatifnya berfokus pada pembentukan kesadaran akan kesempatan kerja yang setara dan mendukung perempuan dalam mencapai kemajuan profesional. Park juga berfokus pada pemberian dukungan terhadap para ibu yang bekerja dengan cara meningkatkan akses terhadap fasilitas pemulihan anak dan dukungan finansial bagi keluarga dengan anak-anak. Dan yang terpenting adalah, kebijakan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan seksual serta mendorong perempuan dalam keterlibatan di ranah politik dan pemerintahan.⁵⁷

Presiden Park Geun-Hye merupakan sosok baru bagi para perempuan di Korea Selatan walaupun terpilih atas sosok ayahnya yang juga Presiden Park Chung-hee mampu menjadi representasi perempuan pertama di Korea Selatan yang menduduki kursi kepresidenan. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari janji kampanye untuk mengatasi isu kesenjangan gender yang selama ini terjadi di Korea Selatan. Namun, di masa pemerintahan Park Geun-Hye diwarnai dengan kontroversi politik dan masalah lainnya yang berdampak pada opini publik terhadap kinerjanya. Pada tahun 2017, ia mengalami pemakzulan dari kepresidenan dan akhirnya dihukum dari jabatannya sehingga upaya-upaya penegakkan kebijakan gender selama pemerintahannya juga dilihat dalam konteks kontroversi belaka.

b. Masa Moon Jae-in (2017-2022)

Kegagalan janji kampanye tentang kesetaraan gender di era Presiden Park Geun-Hye, dimanfaatkan Moon Jae-In dalam pemilu 2017 melalui kampanye

⁵⁷ Valentine Pebrina Friscila Atara, "Konstruksi Sosial Budaya Dan Ketidakadilan Gender Di Korea Selatan," *LIPi*, last modified 2020, <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/konstruksi-sosial-budaya-ketidakadilan-gender-di-korea-selatan.html>.

‘presiden feminis’ untuk mempropagandakan kesetaraan gender. Pasalnya kasus kekerasan gender di masa presiden Park tidak berhasil karena skandal korupsi. Walaupun kasus kekerasan seksual menurun hal tersebut tidak dilihat sebagai keberhasilan menjawab pemenuhan janji politiknya. Hal tersebut-lah membuat Moon menggunakan isu kesetaraan gender dalam kampanye untuk menarik minat pemilihnya.

Di masa Moon Jae-In, ia menunjuk empat menteri perempuan pertama di Korea Selatan dan merupakan jumlah tertinggi kontribusi perempuan dalam kabinet sepanjang sejarah Korea Selatan. Pesan yang disampaikan Moon Jae-In dalam mempolitisasi isu kesetaraan gender untuk mewujudkan kampanye ialah setiap laki-laki diwajibkan untuk mengikuti wajib militer selama kurang lebih dua tahun dan perempuan memiliki banyak waktu untuk mengembangkan karir.⁵⁸

Pada tahun 2017, Presiden Moon Jae-In berjanji dalam pidatonya untuk menyelesaikan kasus kekerasan wanita penghibur dan pemaksaan di rumah bordil sewaktu penjajahan Jepang. Pidato ini sebagai upaya penyelesaian pertentangan dengan Jepang mengenai permasalahan wanita penghibur rumah bordil dan sebagai peringatan ketiga peristiwa yang disampaikan Presiden Moon Jae-In di depan 100 orang aktivis, pejabat pemerintah di Kota Cheounan untuk mengenang para korban kekerasan seksual di masa perang.

Janji kampanye Presiden Moon Jae-In selama kampanye adalah meningkatkan dukungan bagi ibu yang bekerja dengan cara peningkatan fasilitas penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau. Presiden Moon juga menyoroti

⁵⁸ Yunan Bagaskara Pratama, *Loc. Cit.*

permasalahan upah bekerja antara perempuan dan laki-laki, dan berjanji untuk memastikan perempuan mendapatkan bayaran yang setara dengan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan kualifikasi yang sama. Selain itu, Moon berfokus yang kuat pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan melakukan kampanye kesadaran untuk mengubah budaya yang mendukung kekerasan terhadap perempuan.⁵⁹

Di sektor ekonomi, janji kampanye yang diberikan Moon ialah mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai cara termasuk membuat program pembentukan dan dukungan bagi perempuan yang ingin berwirausaha atau mengembangkan usaha kecil dan menengah. Dan berjanji untuk menciptakan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan bagi perempuan terutama perempuan yang sering mengalami tekanan ganda antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Serta memperkuat pendidikan gender dan kesadaran masyarakat seputar isu-isu kesetaraan gender, terutama di kalangan pemuda.⁶⁰



Gambar 2.3 Moon Jae-in mengucapkan terima kasih saat menyapa para pendukungnya di Gwanghwamun Square, Seoul, 9 Mei 2017. Sumber: <https://dunia.tempo.co/read/1450325/partai-pengusung-presiden-moon-jae-in-kalah-di-pemilu-daerah>

⁵⁹ Azza Rizkia, “Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Di Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In,” 2023.

⁶⁰ Sung Deuk Hahm and Uk Heo, “President Moon Jae-in at Midterm: What Affects Public Support for Moon Jae-In?,” *Journal of Asian and African Studies* 55, no. 8 (2020): 1128–1142.

Pada pemilu 2012 Moon Jae-In sebagai calon presiden dari kalangan liberal menuai kontroversi terkait janji kampanyenya tentang gay. Walaupun berangkat dari kalangan liberal akan tetapi kebijakan yang akan dibuat justru bertentangan karena melarang keras tindakan gay. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan latar belakangnya dan para pendukung Moon mengklaim calonnya tidak benar-benar tegas dengan apa yang diyakininya. Namun akhirnya, mengklarifikasi hal itu bahwa dia masih percaya tidak boleh adanya diskriminasi berdasarkan orientasi seksual tiap orang.⁶¹

⁶¹ Chico Harlan, "Park Geun-Hye Memenangkan Pemilihan Presiden Korea Selatan," *The Washington Post*, last modified 2012, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/park-geun-hye-leads-in-south-koreas-presidential-election/2012/12/19/783398d4-49e6-11e2-b6f0-e851e741d196_story.html.